KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEBAGAI AKIBAT PERLUASAN MAKNA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA SEJAK BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Rosita Indrayati, S.H., M.H.
[1]Fakultas Hukum Universitas Jember
Email: rosita_indrayati@unej.ac.id

DOI: https://doi.org/10.55292/0ggzf808

Abstrak

Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dengan jelas dan menyatakan bahwa memberi kewenangan atas yurisdiksi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman lain yang berada di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan perlindungan hukum kepada rakyat tanpa mengorbankan kesewenang-wenangan negara. Upaya ini dipandang sebagai langkah progresif dalam reformasi administrasi pemerintahan, hal ini dikarenakan undang-undang Administrasi pemerintahan bertujuan untuk lebih menekankan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan masyarakat berorientasi pemerintah yang cepat, nyaman, dan murah. Kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara sedikit

@ 2023 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.
This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

mengalami perubahan akibat lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Penambahan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Pasal 87 undang-undang tersebut mengakibatkan kompetensi absolut menjadi diperluas, kewenangan yang dimaksud adalah dalam hal menguji tindakan faktual, menguji penyalahgunaan wewenang, menguji upaya administratif, dan memutus putusan fiktif positif. Perubahan yang mengakibatkan terjadinya perluasan tersebut adalah konsekuensi yuridis dari norma perundang-undangan yang lahirnya setelah undang-undang tentang peradilan tata usaha Negara yang akan meniadakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang terdahulu. Penatalaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pengujian terhadap Keputusan Tata Usaha Negara dilakukan agar upaya perlindungan hukum untuk masyarakat menjadi jelas dan memberi kepastian hukum, sehingga dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan diperlukan penyelarasan dan penyesuaian atas peraturan peradilan tata usaha negara.

Keywords: Kompetensi, absolut, Peradilan Tata Usaha Negara.

Abstract

The position of the State Administrative Court (PTUN) in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia is clearly regulated and states that it gives authority over the jurisdiction exercised by the Supreme Court and other judicial powers under it in the general court environment, religious court, military court, state administrative court, and constitutional court. Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration provides legal protection to the people without compromising state arbitrariness. This effort is seen as a progressive step in government administration reform, this is because the government administration law aims to emphasize more the responsibility of the state and government to ensure the implementation of government-oriented public services that are fast, comfortable, and

inexpensive. The absolute competence of the State Administrative Court underwent a slight change due to the enactment of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. The addition of the authority of the State Administrative Court in Article 87 of the law results in an expansion of absolute competence, the authority referred to is in terms of examining factual actions, examining abuse of authority, examining administrative efforts, and deciding positive fictitious decisions. The change that resulted in this expansion was a juridical consequence of the statutory norms that were born after the law on state administrative justice which would abolish the legal norms of the previous statutory regulations. The administration of governance and review of State Administrative Decisions is carried out so that efforts to protect the law for the community become clear and provide legal certainty, so that with the issuance of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, it is necessary to harmonize and adjust the regulations for state administrative justice.

Key Words: Competence, absolute, State Administrative Court

Latar Belakang

Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke empat menyatakan bahwa:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan.
(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Makamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Makamah Konstitusi.

Pasal 24 jelas menyatakan bahwasannya konsep peradilan tata usaha Negara juga merupakan salah-satu upaya hukum yang dapat ditempuh oleh masyarakat pencari keadilan dalam kaitannya dengan tindakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 serta mulai beroperasi pertama kali pada tanggal 14 Januari 1991 dengan diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991 tentang penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang pembentukan PT. TUN Jakarta, Medan dan Ujung Pandang serta Keppres Nomor 52 Tahun 1990 tentang pembentukan PTUN Jakarta, Medan, Palembang, Surabaya dan Ujung Pandang, sekarang PTUN telah meliputi 4 Pengadilan Tinggi TUN serta 26 Pengadilan Tata Usaha Negara.[1] Kompetensi absolut berkaitan dengan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara adalah Keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Di Indonesia, kewenangan untuk mengkaji kebijakan pemerintah terkait hak warga negara diberikan kepada lembaga hak sipil, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Keberadaan PTUN tidak terlepas dari kewajiban bangsa Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum dan melindungi kepentingan warga negaranya. Kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah diatur dengan jelas. Menyatakan bahwa memberi kewenangan atas yurisdiksi yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan kekuasaan kehakiman lain yang berada di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan

[1] H Ujang Abdullah and M Si, "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," n.d., 1.

militer, peradilan tata usaha negara, dan peradilan konstitusi.[2]

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 47 mengatur tentang kompetensi PTUN dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara. Kewenangan Pengadilan untuk menerima, memeriksa, memutus menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya yang dikenal dengan kompetensi atau kewenangan mengadili. PTUN mempunyai kompetensi menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama. Sedangkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT. TUN) untuk tingkat banding.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa. [3]

Pengaturan status Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Konstitusi dipengaruhi oleh pemikiran bahwa kualitas pengawasan pemerintah perlu ditingkatkan. Dengan kata lain, kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah semakin meningkat. Jelas merugikan masyarakat luas. Undang-Undang Nomor 30 tentang Administrasi Pemerintahan diundangkan pada tahun 2014 untuk memberikan perlindungan hukum kepada rakyat tanpa mengorbankan

[2] Maridjo Maridjo, "KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014," *Jurnal JURISTIC* 3, no. 01 (April 30, 2022): 44, https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984.

[3] S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm. 59

kesewenang-wenangan negara. Hal ini dipandang sebagai langkah progresif dalam reformasi administrasi pemerintahan, hal ini dikarenakan undang-undang Administrasi pemerintahan bertujuan untuk lebih menekankan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk memastikan terselenggaranya pelayanan masyarakat berorientasi pemerintah yang cepat, nyaman, dan murah. Atas dasar itulah, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan diletakkan sebagai salah satu pilar reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.[4] Undang-Undang Administrasi Pemerintahan hadir membawa suatu perubahan antara lain disebabkan penormaan Asas diam berarti setuju.[5] Atau dikenal dengan istilah *lex silencio positive* yang sebelumnya Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara menganut Asas sebaliknya, yakni diam berarti menolak yang disebut dengan Asas Fiktif Negatif. Terminologi fiktif negatif, sebagaimana hal istilah fiktif positif, tidaklah disebutkan secara eksplisit dalam masing-masing undang-undang. Kedua istilah ini merupakan fiksi hukum yang digunakan untuk mempermudah konstruksi hukum dalam Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau Pasal 53 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Istilah *Lex Silencio Positivo* adalah terminologi campuran antara bahasa latin (Lex) dan Spanyol *(Silenci Positivo)* yang dalam terminologi hukum berbahasa Inggris disamakan dengan istilah *fictious approval*.[6]

---

[4] M. Guntur Hamzah, September 2017, Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Kaitannya dengan perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Ahmad, Konsepi Fiktif Positif : Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Replik, Volume 5, 2, hlm 142.

[5] Enrico Simanjuntak, 2018, Hukum Acara Perdadilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi), Sinar Grafika, Jakarta, , hlm 144.

[6] Oswald Jansen, 2008, Comparative inventory of Silencio Positivo (Utrecht School of Law,), dalam Bambang Heriyanto, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pakuan Law Review, Volume 4, Nomor 1, 2018, hlm 40.

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan telah membawa perubahan yang signifikan terhadap praktik penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Administrasi Pemerintahan termasuk dalam kualifikasi Undang-Undang Hukum Materiil, ternyata dalam praktik telah mengakibatkan perubahan dan perluasan menyangkut aspek hukum materiil dan hukum formil penyelenggaraan Peradilan Tata Usaha Negara dari aspek teori, perubahan dan perluasan tersebut adalah konskuensi yuridis karena adanya *adagium lex posteriori derogat lex priori,* bahwa norma peraturan perundang-undangan yang lebih baru meniadakan norma hukum dari peraturan perundang-undangan yang lama.[7] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara mengenai penyelenggaraan pemerintahan. Undang-undang ini merupakan hal baru di bidang hukum administrasi negara yang menjadi dasar penatalaksanaan dalam pengambilan keputusan oleh badan dan atau pejabat tata usaha negara. Penatalaksanaan administrasi pemerintahan sebelum dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selain berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku juga berdasarkan norma, asas hukum administrasi negara yang ada. Norma serta asas hukum administrasi negara yang sifatnya tidak tertulis, pada prakteknya banyak menimbulkan ketidakjelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Norma serta asas hukum administrasi negara tersebut perlu untuk diberi bentuk dalam hukum positif, sehingga dapat menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan.

[7] Maridjo, "KOMPETENSI ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PASCA TERBITNYA UNDANG-UNDANG Nomor 30 TAHUN 2014," hlm. 46.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka terdapat beberapa rumusan masalah yang dinyatakan dalam pernyataan berikut:

1. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.
2. Akibat perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sejak berlakunya Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang terdiri dari 2 (dua) bahan hukum, yakni:[8]

1. Bahan hukum primer yang terdiri atas norma dasar atau kaidah hukum, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang menggunakan dan memberikan penjelasan lebih lanjut dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini terdiri atas literature, artikel juran, dan beberapa penelitian yang sesuai dengan tema tulisan.

[8] Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Persada, 1994), hlm. 13.

Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan.

Kompetensi (kewenangan) suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara dapat dibedakan atas kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif berhubungan dengan kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan wilayah hukumnya. Sedangkan kompetensi absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek, materi atau pokok sengketa.[9] Menurut Soedikno Mertokusumo, Kompetensi absolut atau kewenangan mutlak pengadilan adalah wewenang badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan dalam lingkungan pengadilan lain. [10] Kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya.

Sjachran Basah dalam bukunya menyatakan, baik perbuatan melanggar hukum *(onrechtmatigedaad),* penyalahgunan wewenang *(detournment de pouvoir)* atau perbuatan sewenang-wenang *(abuse de droit)* oleh pejabat administrasi, merupakan perbuatan yang sukar dipisah-pisahkan, karena pada hakekatnya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan mendatangkan kerugian kepada pihak yang terkena akibat perbuatan hukum publik dari pejabat administrasi tersebut.[11]

---

[9] S.F.Marbun, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta, 2003, hlm.59

[10] Soedikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta , 1988, hal. 79.

[11] Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di

Menurut Syahran Basah, apabila hendak juga mengadakan pembedaan bukan pemisahan, maka:[12]

1. Perbuatan administrasi negara yang melanggar hukum *(onrechtmatige overheidsdaad)* adalah perbuatan yang disengaja maupun tidak, yang melanggar undang-undang, peraturan-peraturan formal yang berlaku dan juga kepatutan dalam masyarakat, yang seharusnya dipatuhi oleh penguasa yang menimbulkan kerugian bagi yang terkena.
2. Perbuatan administrasi negara yang menyalahgunakan wewenang *(detournment de pouvoir)* adalah perbuatan yang menggunakan wewenang yang mencapai kepentingan umum yang lain dari pada kepentingan umum yang dimaksud oleh peraturan yang menjadi dasar kewenangan yaitu dan merugikan pihak yang terkena atau perbuatan untuk kepentingan diri sendiri atau untuk kepentingan orang lain atau golongan lain.
3. Perbuatan administrasi negara yang sewenang-wenang *(abus de droit)* adalah perbuatan yang berada di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan.

Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara selama ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata melawan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara. Menurut

Indonesia, Cetakan ke-6, Alumni, Bandung: 2014, hlm. 238, dalam Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/ OOD), ACT DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD, Dewi Asimah dkk, 2020.

[12] Sjahran Basah, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Cetakan ke-6, ibid, hlm. 238.

Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, kewenangan atau kompetensi absolut terbatas pada mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara akibat diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara, yaitu penetapan tertulis yang bersifat konkrit individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.[13]

Menurut ketentuan Pasal 47 UU PTUN, kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul di bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara. [14] Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juga merumuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya KTUN, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[15] Kompetensi absolut PTUN di Indonesia adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara seseorang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian dan tidak dikeluarkannya suatu keputusan yang dimohonkan seseorang sampai batas waktu

---

[13] Imam Soebechi, dkk. Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Press. Yogyakarta, 2014. Hlm. 5 dalam Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, *Pakuan Law Review*, Volume IV, Nomor 1, Januari-Juni 2018, Bambang Heriyanto.

[14] Pasal 1 angka 10 UU Peradilan TUN, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[15] Phulipus M Hadjon, dkk., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan Keenam, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1999, hlm. 318. Dalam Perluasan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, JH IUs Quia Iustum, Volume 25 Issue 2, Mei 2018, Ridwan dkk, hlm. 344.

yang ditentukan dalam suatu peraturan perundang-undangan padahal hal tersebut merupakan kewajiban badan atau pejabat tata usaha negara yang bersangkutan.[16] KTUN merupakan dasar lahirnya sengketa tata usaha Negara. Yang dimaksud dengan KTUN menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Pengaturan mengenai KTUN merupakan hal atau point penting untuk dijadikan pencermatan terkait dengan kajian hal ini dikarenakan meluas atau menyempitnya kompetensi absolut PTUN didasarkan pada ruang lingkup KTUN itu sendiri. Keberadaan KTUN tersebut merupakan hal paling vital dalam kompetensi absolut PTUN karena sengketa TUN lahir dikarenakan terdapatnya KTUN tersebut.

Ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ini dirasa sudah tidak relevan lagi untuk dipertahankan, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai penggantinya. Keluarnya undang-undang ini memancing pro dan kontra dikalangan ahli hukum administrasi terkait dengan berbagai materi yang di atur, terutama dalam hal perluasan kompetensi absolut PTUN. Dinamika pengaturan mengenai KTUN tersebut juga terdapat dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyatakan:

[16] Fatria Khairo. (2017). Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.Jurnal Lex Librum, Vol. 3. No. 2. hlm. 545.

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat".

Akan tetapi meskipun demikian terdapat pembatasan-pembatasan terhadap KTUN tersebut, yaitu dalam Pasal 2, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 142. Pembatasan tersebut dapat dibedakan menjadi pembatasan langsung, pembatasan tidak langsung, dan pembatasan langsung bersifat sementara.[17]

1. Pembatasan Langsung

Pembatasan langsung adalah pembatasan yang tidak memungkinkan sama sekali PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut. Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara, sangat luas. Namun, apabila dilihat dari pembatasan yang diberikan Undang-undang Peradilan Tata Usaha itu sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 2 UU Peradilan TUN,maka

[17] Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah, Jurnal Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Onma Ezra Rodi Aprilo dkk, Volume 5 Nomor 2, Agustus Tahun 2022, Hlm. 163.

kompetensi Peradilan TUN dalam mengadili Keputusan TUN adalah terbatas.[18]

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan:

> Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut undang-undang ini :
>
> a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
> b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
> c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
> d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
> e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
> f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
> g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum.

Selanjutnya Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan:

> "Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara tertentu dalam hal keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan:

[18] Dewi Asimah. (2020). Implementasi Perluasan Kompetensi PTUN Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD. ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan. Vol. 1. No. 1. hlm. 154-155

a. dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, atau keadaan luar biasa yang membahayakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
b. dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

3. Pembatasan Tidak Langsung

Pembatasan tidak langsung merupakan pembatasan kompetensi absolut yang masih memungkinkan bagi PTUN untuk memeriksa dan memutus sengketa administrasi dengan ketentuan bahwa seluruh upaya administratif yang ada sudah ditempuh. Pembatasan tidak langsung diatur dalam Pasal 48 UUPTUN yang mengatur bahwa:[19]

a. Dalam hal suatu badan atau pejabat TUN diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tersebut harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersebut.
b. Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

3. Pembatasan Langsung Bersifat Sementara

Pembatasan ini bersifat langsung yang tidak ada kemungkinan sama sekali untuk PTUN untuk mengadili sengketa tersebut, tetapi sifatnya sementara dan satu kali atau *einmalig*.

Bab IV Ketentuan Peralihan Pasal 142 ayat (1) mengatur bahwa, "sengketa tata usaha negara yang pada

[19] Ibid hlm. 546.

saat terbentuknya Pengadilan menurut UU ini belum diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum tetap diperiksa dan diputus oleh Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum".

Akibat perluasan makna Keputusan Tata Usaha Negara sejak berlakunya undang-undang tentang administrasi pemerintahan.

Pemberlakukan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, telah membawa perubahan besar terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memberikan pemaknaan KTUN yang lebih luas, hal mana terlihat dari rumusan definisi tentang KTUN.[20] PTUN mengalami perluasan kompetensi absolut yang signifikan setelah diundangkanya UUAP yang memberikan wewenang kepada PTUN untuk mengadili objek sengketa di luar KTUN atau *beschikking,* yaitu tindakan administrasi atau bestuur handelinger. Perluasan kompetensi PTUN dalam UU tentang AP adalah:[21]

Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 9 mengatur bahwa, KTUN (Obyek sengketa Tata Usaha Negara) adalah penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 adalah:

1. Penetapan tertulis;
2. Diterbitkan oleh Badan/Pejabat Tata usaha Negara;
3. Yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara;

[20] UU No. 30 Tahun 2014 menggunakan terminologi Keputusan TUN dengan Keputusan Administrasi pemerintahan.

[21] Dewi Asimah, Op.Cit., h. 153-154

4. Bersifat konkrit;
5. Individual; dan
6. Final;
7. Yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata.

Sementara pada Pasal 1 angka 7 Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 1 angka 7 UU AP tersebut terkandung unsur :

1. Ketetapan tertulis
2. dikeluarkan oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintahan.
3. dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Hal yang membedakan pengertian KTUN diantara kedua undang-undang tersebut adalah bahwasannya pada undang-undang tentang PTUN yang mengeluarkan KTUN adalah badan/ pejabat tata usaha Negara sedangkan pada undang-undang tentang administrasi pemerintahan yang mengeluarkan KTUN adalah badan dan/atau pejabat pemerintahan. Sedangkan pengertian badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak dijelaskan lebih lanjut pada pasal 1 undang-undang tentang administrasi pemerintahan tersebut. Pada ketentuan Pasal 1 angka 7 UU AP mengurangi dan menghilangkan kata konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi orang/badan hukum perdata. Berdasarkan kedua pengertian tersebut dapat digambarkan bahwasannya UU tentang AP telah mengalami perluasan makna KTUN sebagaimana yang telah disebutkan dalam UU tentang PTUN, menurut J.J.H. Bruggink semakin banyak unsur suatu pasal, tentu semakin sempit cakupannya. Semakin sedikit unsur suatu pasal, maka cakupan pengertiannya akan lebih luas. PTUN mengalami perluasan

yang cukup mendasar dan signifikan dengan adanya UU tentang AP tersebut, yang secara langsung memberikan kewenangan kepada PTUN untuk mengadili obyek sengketa diluar apa yang tercantum dalam UU tentang PTUN yakni diluar KTUN atau *beschiking*. Perluasan kompetensi absolut yang dimaksud terdapat pada hal-hal sebagai berikut:[22]

1. PTUN diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili tindakan-tindakan administrasi *(bestuurhandelingen)* yang dilakukan Badan dan/atau Pejabat TUN.
2. PTUN diberi kewenangan berdasarkan Pasal 21 UU tentang AP untuk menentukan ada tidaknya penyalahgunaan wewenang oleh badan atau pejabat administrasi berdasarkan permohonan badan atau seorang pejabat administrasi, (sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang).

Pasal 21 UU tentang AP:[23]

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan.
(2) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menilai ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang dalam Keputusan dan/atau Tindakan.
(3) Pengadilan wajib memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan diajukan.
(4) Terhadap putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
(5) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara wajib memutus permohonan banding sebagaimana dimaksud pada

[22] Dewi Asimah, Op.Cit., hlm. 547.
[23] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

ayat (4) paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan banding diajukan.

(6) Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

3. Kompetensi absolut PTUN berdasarkan UU tentang AP menyangkut upaya administrasi. Pasal 76 Ayat (3) UU tentang AP menyatakan:

> "Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke PTUN",

Pasal 76 ayat (3) diatas memberikan pengertian bahwasannya setelah melalui upaya administrastif dapat mengajukan kepada kompetensi PTUN untuk mengadilinya.

Pasal 87 UU tentang AP yang memberikan perluasan makna KTUN membawa konsekuensi yuridis kompetensi PTUN menjadi semakin luas dan dapat memberikan perubahan aspek hukum formil di PTUN, perubahan tersebut terdapat pada hal-hal:

a. Apabila sebelumnya dalam UU tentang PTUN keputusan selalu dikaitkan dengan sifatnya yang konkret, individual, dan final, di mana putusan yang tidak mencakup tiga hal itu secara kumulatif maka tidak dapat diajukan ke PTUN. Akan tetapi dalam UU tentang AP hal ini tidak lagi harus mencakup ketiga sifat tersebut, karena dalam Pasal ini hanya dikatakan "Bersifat final dalam arti yang lebih luas".
b. Kompetensi PTUN terhadap tindakan administrasi pemerintahan/tindakan faktual pejabat TUN (Pasal 1 angka 8 UUAP, Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan), artinya UU tentang AP ini menyetarakan

kata/istilah keputusan dengan tindakan. Tindakan faktual ini merupakan istilah baru yang belum dikenal dalam UU sebelumnya, meskipun secara teoritis sudah banyak dibahas oleh banyak ahli hukum administrasi. Berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (1) jo. Pasal 76 ayat (3) jis. Pasal 1 angka 8, UU tentang AP tersebut, maka Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh kewenangan baru, yakni sengketa TUN dengan objek sengketa berupa "tindakan administrasi pemerintahan" *(feitelijke handeling)*.[24] Sebelumnya, berdasar UU tentang PTUN obyek sengketa TUN terbatas hanya KTUN dalam bentuk tertulis *(rechtelijke handelingen)* saja. Padahal sebelum berlakunya UU tentang AP, Tindakan Administrasi Pemerintahan/Tindakan faktual administrasi Pemerintahan adalah menjadi kompetensi absolut Peradilan Umum, yakni dalam format gugatan perbuatan melawan hukum penguasa *(onrechtmatige overheidsdaad)*.

4. Ruang lingkup pejabat yang mengeluarkan keputusan pada UU tentang PTUN adalah hanya terbatas pada badan dan/atau pejabat TUN dilingkungan eksekutif saja, akan tetapi pada UU tentang AP ini ruang lingkupnya menjadi diperluas menjadi pemerintah dalam arti yang lebih luas, yakni eksekutif, legislative dan yudikatif. Ketentuan ini secara implisit dinyatakan pada Pasal 4 UU tentang AP.[25]

---

[24] Pasal 1 angka 8, UU AP: "Tindakan Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Tindakan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan."

[25] Pasal 4 UU tentang AP menyatakan:

(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:
   a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
   b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
   c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang telah disampaikan penulis, maka terdapat beberapa hal yang akan disampaikan yakni setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan membuat perubahan yang sangat signifikan terhadap kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara yang sebelumnya sudah diatur dalam Undang-Undang tentang PTUN. Hal ini dikarenakan terdapatnya perluasan tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam UU tentang AP terdapat pada Pasal 87, perluasan tersebut terdapat pada perluasan pada makna keputusan dan administrasi pemerintahan yang mencakup keputusan yang dibuat oleh Ekeskutif, Legislatif dan yudikatif, serta penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual, serta keputusan yang bersifat final dan lebih luas, makna final dan lebih luas membuat hal yang berbeda yang terdapat pada UU tentang PTUN sebelumnya yakni bersifat konkret, individual dan final.

Daftar Pustaka

Abdullah, H Ujang, and M Si. "Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," n.d.

Maridjo, Maridjo. "Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 TAHUN 2014." *Jurnal JURISTIC* 3, no. 01 (April 30, 2022): 43–58. https://doi.org/10.35973/jrs.v3i01.2984.

Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan

d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

(2) Pengaturan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup tentang hak dan kewajiban pejabat pemerintahan, kewenangan pemerintahan, diskresi, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, prosedur administrasi pemerintahan, keputusan pemerintahan, upaya administratif, pembinaan dan pengembangan administrasi pemerintahan, dan sanksi administratif.

Bambang Heriyanto, 2018, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Paradigma Uu No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Pakuan Law Review, Volume 4, Nomor 1.

Dewi Asimah dkk, 2020, Implementasi Perluasan Kompetensi Ptun Dalam Mengadili Tindakan Faktual (Onrechtmatige Overheidsdaad/OOD), ACT DIURNAL, Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum UNPAD.

Enrico Simanjuntak, 2018, Hukum Acara Perdadilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi), Sinar Grafika, Jakarta.

Fatria Khairo. 2017. Urgensi Pembatasan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia.Jurnal Lex Librum, Vol. 3. No. 2.

Imam Soebechi, dkk. 2014, Bunga Rampai Peradilan Administrasi Kontemporer, Genta Press. Yogyakarta.

M. Guntur Hamzah, September 2017, Paradigma Baru Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Kaitannya dengan perkembangan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, dalam Ahmad, Konsepi Fiktif Positif : Penerapannya di Pengadilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Replik, Volume 5, issue 2.

Onma Ezra Rodi Aprilio dkk, 2022, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Tanah Terhadap Sertifikat Hak Atas Tanah, Jurnal Puslitbang Hukum dan Peradilan Ditjen Badan peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Onma Ezra Rodi Aprilo dkk, Volume 5 Nomor 2.

Oswald Jansen, 2008, Comparative inventory of Silencio Positivo (Utrecht School of Law,),.S.F. Marbun, 2003, Peradilan Tata Usaha Negara, Penerbit Liberty, Yogyakarta.

Phulipus M Hadjon, dkk., 1999, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Cetakan Keenam, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Soerdjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1994, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat Persada.

Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta.

S.F.Marbun, 2003, Peradilan Tata Usaha Negara, Liberty, Yogyakarta.

Sjahran Basah, 2014, Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia, Cetakan ke-6, Alumni, Bandung.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara